Jelajah Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 2, *Issue*-1, 2026
E-ISSN: 3110-8334
Website: https://publications.corejurnal.com/index.php/ekonomi

Analisis Kapasitas Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Merpak Kabupaten Sintang

Barliy Brasila
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapuas Raya Sintang
*Email korespondensi: barliybrasila09@gmail.com

Abstrak

Kapasitas aparatur desa berperan penting dalam mendukung efektivitas pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik. Namun, keterbatasan kompetensi masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Merpak, Kabupaten Sintang. Penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas aparatur desa berdasarkan dimensi individual, organisasional, dan institusional serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukungnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilaksanakan pada 1–7 November 2025 di Desa Merpak, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan pemilihan informan secara *purposive sampling*. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Kapasitas aparatur belum optimal, ditandai oleh ketidakmerataan pemahaman regulasi dan keterampilan penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), lemahnya koordinasi internal, serta keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan dan pelaporan. Faktor penghambat meliputi keterbatasan pelatihan, perbedaan kompetensi, dan infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai. Faktor pendukung mencakup komitmen Kepala Desa, dukungan Badan Permusyawaratan Desa, partisipasi masyarakat, serta pendampingan teknis. Penguatan kapasitas aparatur memerlukan peningkatan kompetensi teknis, pemerataan pemahaman regulasi, perbaikan koordinasi, dan pendampingan berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Kata kunci: Kapasitas Aparatur Desa; Pemerintahan Desa; Kompetensi SDM; Tata Kelola Desa; Siskeudes.

Analysis of the Capacity of Village Officials in the Administration of Government in Merpak Village, Sintang Regency

Abstract

The capacity of village officials plays an important role in supporting effective governance, financial management, and public services. However, limited competencies remain a challenge in village administration in Merpak Village, Sintang Regency. This study aims to analyze the capacity of village officials based on individual, organizational, and institutional dimensions and identify supporting and inhibiting factors. This study employed a descriptive qualitative approach conducted from November 1–7, 2025, in Merpak Village, Kelam Permai District, Sintang Regency. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, with informants selected using purposive sampling. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The capacity of village officials was not yet optimal, as indicated by uneven understanding of regulations, limited proficiency in using the Village Financial System (Siskeudes), weak internal coordination, and delays in planning and reporting. Inhibiting factors included inadequate training, competency disparities, and limited information technology infrastructure. Supporting factors included the Village Head's commitment, support from the Village Consultative Body, community participation, and technical assistance. Strengthening village officials' capacity requires improving technical competencies, regulatory understanding, internal coordination, and continuous assistance to achieve effective, transparent, and accountable village governance.

Keywords: *Village Officials' Capacity; Village Governance; Human Resource Competencies; Village Financial System; Public Administration.*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan, pengelolaan sumber daya, dan penyediaan pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah melalui

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan landasan hukum bagi pemerintah desa dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan secara mandiri. Kewenangan tersebut menuntut aparatur desa memiliki kapasitas yang memadai dalam perencanaan pembangunan, administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik. Kapasitas aparatur tidak hanya mencakup pengetahuan dan keterampilan individu, tetapi juga kemampuan organisasi dalam membangun koordinasi serta dukungan kelembagaan untuk menciptakan tata kelola yang efektif dan akuntabel. Bebbington et al. (2006) menjelaskan bahwa kapasitas lokal dalam tata kelola desa berkaitan dengan kemampuan kelembagaan, hubungan sosial, dan pemanfaatan sumber daya dalam mendukung pembangunan perdesaan. Sejalan dengan hal tersebut, Sutiyo dan Maharjan (2017) menekankan pentingnya kapasitas kelembagaan pemerintahan desa yang mencakup kemampuan aparatur dan efektivitas kerja organisasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Permasalahan kapasitas aparatur menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Merpak, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan data profil desa tahun 2023 yang digunakan dalam penelitian, Desa Merpak memiliki jumlah penduduk sekitar 1.990 jiwa dengan mayoritas masyarakat bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan. Alokasi Dana Desa selama periode 2022–2024 dilaporkan mencapai rata-rata Rp1,2 miliar per tahun, sehingga diperlukan kemampuan aparatur dalam mengelola anggaran, menyusun dokumen perencanaan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan secara transparan. Namun, kondisi penyelenggaraan pemerintahan desa menunjukkan adanya indikasi keterbatasan kompetensi aparatur, terutama dalam penguasaan regulasi, pengelolaan administrasi keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan koordinasi antarperangkat desa. Keterbatasan sarana pendukung, khususnya koneksi internet dan perangkat teknologi informasi, turut menjadi tantangan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan berbasis digital. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks dan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya secara optimal.

Secara empiris, kesenjangan kapasitas aparatur Desa Merpak terlihat berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nyamin selaku Sekretaris Desa Merpak pada 4 November 2025. Informan menjelaskan bahwa pemahaman aparatur terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa belum merata. Pengoperasian aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), penginputan data, serta penyusunan administrasi keuangan masih bergantung pada Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak seluruh perangkat desa memiliki keterampilan teknis yang memadai untuk menjalankan pekerjaan administratif secara mandiri. Selain itu, koordinasi dan komunikasi antarperangkat desa belum berjalan optimal sehingga berdampak pada keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan dan pelaporan. Pendampingan dari Pendamping Desa juga masih diperlukan, terutama dalam penyusunan anggaran tahunan. Temuan tersebut menjadi contoh nyata kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan kemampuan aktual aparatur. Ketergantungan pekerjaan pada perangkat tertentu berpotensi menghambat kelancaran administrasi dan mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan apabila tidak didukung pembagian tugas serta transfer pengetahuan yang memadai.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan desa dari berbagai perspektif. Bebbington et al. (2006) mengkaji kapasitas lokal dan tata kelola desa dalam pembangunan perdesaan di Indonesia dengan menekankan pentingnya hubungan sosial, sumber daya, dan kemampuan kelembagaan. Sutiyo dan Maharjan (2017) membahas kapasitas kelembagaan pemerintah desa serta pentingnya kemampuan organisasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, Putri dan Umar (2024) mengkaji pengelolaan keuangan desa dengan perhatian pada proses administrasi, penyusunan laporan keuangan, dan penggunaan aplikasi Siskeudes. Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan dukungan kelembagaan berperan penting dalam efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Namun, kajian tersebut memiliki penekanan yang berbeda, yaitu pada kapasitas lokal, kapasitas kelembagaan, dan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, masih terdapat kebutuhan untuk memahami secara lebih kontekstual bagaimana keterbatasan kompetensi teknis aparatur berkaitan dengan koordinasi internal dan dukungan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Merpak.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) terletak pada perlunya pembahasan yang menghubungkan kapasitas individual, organisasional, dan institusional secara terpadu dalam menjelaskan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian terdahulu telah memberikan pemahaman mengenai pentingnya kompetensi aparatur dan kapasitas kelembagaan, tetapi belum secara khusus menjelaskan keterkaitan ketimpangan penguasaan Siskeudes, ketergantungan administrasi pada perangkat tertentu, hambatan koordinasi, dan dukungan kelembagaan dalam konteks Desa Merpak. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian ketiga dimensi kapasitas tersebut secara bersamaan dengan menggunakan bukti empiris dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Kapasitas individual ditinjau melalui pemahaman regulasi dan keterampilan teknis, kapasitas organisasional melalui pembagian tugas dan koordinasi kerja, sedangkan kapasitas institusional melalui akuntabilitas, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), partisipasi masyarakat, dan dukungan sarana pemerintahan. Keterkaitan ketiga dimensi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor yang menyebabkan kapasitas aparatur belum optimal sekaligus menunjukkan potensi penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kapasitas aparatur Desa Merpak, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan dimensi individual, organisasional, dan institusional. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas administrasi, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, dan perencanaan pembangunan desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan pemahaman mengenai kapasitas aparatur pemerintahan desa, khususnya dalam menjelaskan keterkaitan antara kompetensi individu, efektivitas organisasi, dan dukungan kelembagaan. Hasil penelitian juga diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam penguatan kompetensi, perbaikan koordinasi internal, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa Merpak yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Merpak, Kabupaten Sintang. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pengalaman, pemahaman, keterampilan, serta kendala yang dihadapi aparatur dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Creswell dan Creswell (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial berdasarkan pengalaman dan perspektif individu dalam lingkungan alaminya. Melalui pendekatan ini, kapasitas aparatur dikaji berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kapasitas individual, organisasional, dan institusional.

Penelitian dilaksanakan di Desa Merpak, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan adanya indikasi keterbatasan kapasitas aparatur dalam pengelolaan pemerintahan desa, khususnya pada aspek administrasi, pengelolaan keuangan, penguasaan teknologi informasi, dan koordinasi kelembagaan. Pengumpulan data berlangsung selama tujuh hari, yaitu pada 1–7 November 2025, melalui wawancara mendalam, observasi, dan pengumpulan dokumen pendukung. Salah satu wawancara dilakukan pada 4 November 2025 dengan Sekretaris Desa Merpak. Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperoleh informasi empiris mengenai kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan, tanggung jawab, dan pengetahuan mereka mengenai aktivitas pemerintahan desa. Informan yang menjadi sasaran pengumpulan data meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan Pendamping Desa. Sementara itu, data sekunder mencakup dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta laporan realisasi anggaran dan pertanggungjawaban keuangan desa periode 2022–2024.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara diarahkan pada tiga dimensi kapasitas aparatur desa. Dimensi individual mencakup pemahaman regulasi pemerintahan desa, kemampuan melaksanakan tugas pokok dan fungsi, keterampilan administrasi dan pengelolaan keuangan, penguasaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), serta kemampuan menggunakan teknologi informasi. Dimensi organisasional meliputi pembagian tugas, koordinasi antarperangkat, komunikasi internal, ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, serta pelaksanaan standar operasional prosedur. Dimensi institusional mencakup akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, hubungan pemerintah desa dengan BPD, partisipasi masyarakat, dukungan Pendamping Desa, serta ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan.

Observasi diarahkan pada aktivitas pelayanan administrasi, koordinasi kerja, pemanfaatan teknologi informasi, dan pelaksanaan tugas aparatur desa. Dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen perencanaan, pengelolaan keuangan, serta pelaporan pemerintahan desa. Untuk mengidentifikasi kapasitas aparatur yang belum optimal, penelitian menelaah kesenjangan antara tuntutan pelaksanaan tugas dan kemampuan aparatur dalam memenuhinya. Indikator yang diperhatikan meliputi keterbatasan penguasaan aplikasi Siskeudes, ketergantungan pelaksanaan administrasi keuangan pada perangkat tertentu, kendala koordinasi antaraparatur, serta keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan. Indikasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan keterangan informan dan dokumen pendukung untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan kapasitas aparatur secara lebih objektif.

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kondensasi data dilakukan dengan memilih, mengelompokkan, dan menyederhanakan informasi yang berkaitan dengan kapasitas individual, organisasional, dan institusional. Data selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan pengelompokan tematik untuk memperlihatkan pola permasalahan, hubungan antarfaktor, serta kondisi kapasitas aparatur desa. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan keterkaitan antartemuan berdasarkan informasi yang diperoleh selama pengumpulan data.

Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan antar-informan yang memiliki peran berbeda dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemeriksaan tersebut bertujuan meningkatkan kredibilitas temuan serta memastikan bahwa gambaran mengenai kapasitas aparatur Desa Merpak didasarkan pada informasi yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Merpak

Desa Merpak terletak di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan profil desa tahun 2023, jumlah penduduk Desa Merpak sekitar 1.990 jiwa, dengan sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan. Dalam periode 2022–2024, alokasi Dana Desa rata-rata dilaporkan mencapai Rp1,2 miliar per tahun. Besarnya sumber daya keuangan yang dikelola menuntut aparatur desa memiliki kompetensi administrasi, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik yang memadai. Namun, kondisi geografis serta keterbatasan jaringan internet dan infrastruktur pendukung menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan selama pengumpulan data pada 1–7 November 2025, ditemukan sejumlah permasalahan yang menunjukkan bahwa kapasitas aparatur Desa Merpak belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan secara optimal. Permasalahan tersebut meliputi ketidakmerataan pemahaman regulasi, keterbatasan keterampilan menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), ketergantungan administratif pada perangkat tertentu, lemahnya

koordinasi internal, serta kendala penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan. Temuan tersebut dibahas berdasarkan tiga dimensi kapasitas, yaitu individual, organisasional, dan institusional.

Kapasitas Individual (Pengetahuan dan Keterampilan)

Kapasitas individual aparatur Desa Merpak menunjukkan adanya ketimpangan penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Ketimpangan tersebut terlihat terutama pada pemahaman regulasi pengelolaan keuangan desa dan kemampuan mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Pelaksanaan administrasi keuangan masih bertumpu pada Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan, sedangkan perangkat lainnya belum memiliki tingkat penguasaan teknis yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan menjalankan pekerjaan administratif belum terdistribusi secara merata dalam organisasi pemerintahan desa.

Bukti empiris mengenai kondisi tersebut diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Nyamin selaku Sekretaris Desa Merpak pada 4 November 2025. Dalam wawancara tersebut, informan menjelaskan bahwa pemahaman terhadap Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 belum merata dan pengoperasian Siskeudes masih terpusat pada perangkat tertentu. Informan juga menyampaikan bahwa pendampingan teknis dari Pendamping Desa masih diperlukan, khususnya dalam penyusunan anggaran tahunan. Keterangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan kompetensi pengelolaan keuangan desa dan kemampuan teknis yang dimiliki aparatur. Ketergantungan terhadap perangkat tertentu menjadi salah satu indikator keterbatasan kapasitas individual. Ketika sebagian besar pekerjaan penginputan data dan penyusunan dokumen keuangan dilaksanakan oleh sejumlah kecil aparatur, proses administrasi berpotensi mengalami hambatan apabila perangkat yang memiliki keterampilan tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya. Ketergantungan ini juga menunjukkan bahwa proses transfer pengetahuan dan pembelajaran internal belum berjalan secara optimal.

Selain penguasaan teknologi, pemahaman terhadap standar operasional prosedur dan keterampilan pelayanan publik juga menjadi aspek yang memerlukan perhatian. Naskah hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi keterlambatan pelayanan dan keterbatasan keterampilan manajerial. Namun, besaran keterlambatan dan jumlah perangkat yang mengalami kesulitan belum dijelaskan secara kuantitatif. Oleh sebab itu, temuan ini lebih tepat dipahami sebagai indikasi permasalahan kapasitas yang diperoleh melalui informasi kualitatif, bukan sebagai ukuran tingkat kompetensi seluruh perangkat desa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan teknologi administrasi pemerintahan memerlukan kesiapan sumber daya manusia yang memadai. Penguasaan aplikasi Siskeudes tidak cukup hanya dimiliki oleh perangkat yang bertanggung jawab langsung terhadap keuangan, tetapi juga perlu didukung pemahaman bersama mengenai alur administrasi, pembagian tugas, dan mekanisme pertanggungjawaban. Dewi et al. (2022) membahas keterbatasan literasi digital aparatur dalam pengelolaan keuangan desa, sedangkan Putra dan Handayani (2024) mengaitkan kesiapan sumber daya aparatur dengan penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis digital. Kedua rujukan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembahasan setelah informasi bibliografis dan isi publikasinya dipastikan sesuai.

Dengan demikian, permasalahan kapasitas individual di Desa Merpak terutama berkaitan dengan ketidakmerataan kompetensi, keterbatasan keterampilan digital, dan tingginya ketergantungan kerja pada aparatur tertentu. Penguatan kapasitas perlu diarahkan pada pemerataan pemahaman regulasi, peningkatan keterampilan penggunaan Siskeudes, dan pembelajaran antaraparat dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

Kapasitas Organisasional (Struktur dan Proses)

Kapasitas organisasional berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam mengoordinasikan sumber daya, membagi tanggung jawab, serta melaksanakan proses perencanaan dan pelaporan secara efektif. Pemerintah Desa Merpak telah memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas yang mengacu pada ketentuan penyelenggaraan pemerintahan desa. Akan tetapi, keberadaan

struktur formal tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh koordinasi dan komunikasi internal yang optimal. Permasalahan organisasional teridentifikasi dalam pelaksanaan administrasi dan penyusunan dokumen perencanaan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi antarperangkat desa masih menghadapi kendala sehingga penyelesaian dokumen pemerintahan belum selalu berjalan tepat waktu. Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Nyamin, Sekretaris Desa Merpak, pada 4 November 2025, yang menjelaskan bahwa koordinasi dan komunikasi internal belum optimal dan berdampak pada keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan serta pelaporan. Temuan ini memberikan contoh nyata mengenai keterkaitan antara keterbatasan kapasitas aparatur dan pelaksanaan fungsi organisasi. Keterlambatan penyusunan dokumen tidak hanya berkaitan dengan keterampilan individu dalam mengolah data, tetapi juga dengan proses komunikasi, pembagian pekerjaan, dan penyampaian informasi antarbagian. Ketika penyelesaian dokumen bergantung pada perangkat tertentu dan koordinasi tidak berlangsung efektif, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi lebih rentan terhadap hambatan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan desa, kemampuan organisasional sangat diperlukan agar penyusunan RPJMDes dan RKPDes dapat dilaksanakan sesuai tahapan dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan tidak hanya membutuhkan penguasaan administrasi, tetapi juga koordinasi antara kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan unsur masyarakat. Lemahnya koordinasi dapat membatasi kualitas penyusunan dokumen dan mengurangi efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Permasalahan lain berkaitan dengan orientasi pelaporan yang cenderung menekankan pemenuhan kewajiban administratif. Laporan pertanggungjawaban seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formal, tetapi juga memberikan informasi mengenai penggunaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas organisasional perlu mencakup penguatan koordinasi kerja, penyusunan jadwal kegiatan, pemerataan tanggung jawab, serta mekanisme pemeriksaan dokumen sebelum disampaikan kepada pihak terkait.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kapasitas organisasional tidak dapat dipisahkan dari kapasitas individual. Keterbatasan keterampilan aparatur menjadi lebih kompleks apabila tidak diimbangi sistem koordinasi dan pembagian tugas yang efektif. Sebaliknya, penguatan mekanisme kerja organisasi dapat membantu aparatur mengembangkan keterampilan melalui kerja sama dan pembelajaran bersama.

Kapasitas Institusional (Akuntabilitas dan Sinergi)

Kapasitas institusional berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa membangun hubungan kerja, menjalankan prinsip akuntabilitas, menyediakan informasi publik, serta memanfaatkan dukungan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Merpak memiliki dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan Pendamping Desa. Namun, dukungan tersebut masih menghadapi keterbatasan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan secara optimal. Dari aspek akuntabilitas, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa masih menghadapi kendala berupa ketergantungan pada aparatur tertentu dan keterlambatan penyelesaian dokumen. Keadaan ini dapat membatasi ketepatan waktu penyediaan informasi administrasi dan pertanggungjawaban. Meskipun demikian, keterlambatan administratif tidak secara langsung membuktikan adanya penyimpangan keuangan. Penilaian mengenai kualitas akuntabilitas perlu mempertimbangkan kelengkapan dokumen, kesesuaian prosedur, serta bukti pelaksanaan pengawasan.

Peran BPD menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa. Berdasarkan uraian hasil penelitian, fungsi pengawasan BPD telah berjalan, tetapi efektivitasnya masih lebih terlihat pada pemeriksaan aspek formal dan legalitas. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan pengawasan terhadap kualitas pelaksanaan program dan pemanfaatan anggaran pembangunan desa. Aspek transparansi juga menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Merpak. Penyampaian informasi APBDes kepada masyarakat telah disebutkan dalam hasil penelitian, tetapi pemahaman masyarakat terhadap informasi tersebut dinyatakan masih terbatas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi tidak cukup dilakukan melalui penyediaan informasi, melainkan juga memerlukan komunikasi yang mudah dipahami agar masyarakat dapat mengetahui prioritas penggunaan anggaran dan perkembangan kegiatan pembangunan desa.

Selain hubungan dengan BPD dan masyarakat, kapasitas institusional juga dipengaruhi oleh dukungan Pendamping Desa. Berdasarkan hasil wawancara, Pendamping Desa masih dibutuhkan untuk membantu aparatur dalam penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan. Kehadiran pendamping memberikan dukungan teknis yang penting, terutama ketika kemampuan perangkat desa belum merata. Namun, ketergantungan yang berlangsung terus-menerus berpotensi menghambat kemandirian organisasi apabila tidak disertai proses transfer pengetahuan. Ketersediaan infrastruktur turut memengaruhi kapasitas institusional. Keterbatasan koneksi internet, perangkat teknologi informasi, dan dukungan fasilitas kerja dapat menghambat penggunaan aplikasi administrasi serta penyampaian laporan berbasis digital. Dalam kondisi demikian, peningkatan keterampilan aparatur perlu berjalan bersamaan dengan penyediaan fasilitas yang mendukung pelaksanaan pekerjaan.

Secara keseluruhan, kapasitas institusional Desa Merpak memiliki potensi penguatan melalui komitmen pemerintah desa, dukungan BPD, partisipasi masyarakat, dan keberadaan Pendamping Desa. Faktor-faktor tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas koordinasi kelembagaan, memperluas pemahaman masyarakat terhadap informasi pemerintahan, dan meningkatkan kemandirian aparatur dalam menjalankan tugas.

Faktor Penghambat dan Pendukung Kapasitas Aparatur Desa

Temuan pada ketiga dimensi kapasitas menunjukkan bahwa keterbatasan aparatur Desa Merpak tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kondisi organisasi dan lingkungan kelembagaan. Faktor penghambat meliputi keterbatasan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan tugas, perbedaan latar belakang pendidikan, serta keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Sementara itu, faktor pendukung mencakup komitmen Kepala Desa, keterlibatan masyarakat, dan dukungan teknis dari Pendamping Desa.

Faktor-faktor tersebut dirangkum dalam Tabel 1 untuk memperlihatkan hubungan antara hambatan yang dihadapi aparatur dan sumber daya pendukung yang tersedia dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Merpak.

Tabel 1. Faktor Penghambat dan Pendukung Kapasitas Aparatur Desa Merpak

Faktor	**Temuan Lapangan**
Penghambat	Pelatihan aparatur belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dan belum didukung pendampingan lanjutan yang terstruktur.
Penghambat	Perbedaan latar belakang pendidikan dan keterampilan menyebabkan penguasaan tugas administrasi dan keuangan belum merata.
Penghambat	Keterbatasan jaringan internet dan perangkat teknologi informasi menghambat kelancaran administrasi digital.
Pendukung	Kepala Desa menunjukkan komitmen untuk mendorong peningkatan kemampuan aparatur melalui kegiatan pembelajaran dan pelatihan.
Pendukung	Tokoh masyarakat dan BPD memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa.
Pendukung	Pendamping Desa berperan memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan administrasi dan penyusunan anggaran.

Sumber: Data penelitian, 2025.

Berdasarkan Tabel 1, hambatan peningkatan kapasitas aparatur tidak dapat diselesaikan hanya melalui pelatihan formal. Perbedaan kompetensi dan tuntutan pekerjaan menunjukkan pentingnya identifikasi kebutuhan pelatihan agar materi yang diberikan sesuai dengan tugas masing-masing perangkat. Pelatihan mengenai pengelolaan keuangan dan penggunaan Siskeudes perlu disertai kegiatan praktik langsung serta pendampingan setelah pelatihan sehingga kemampuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam pekerjaan rutin.

Dukungan kepemimpinan Kepala Desa juga memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan penguatan kapasitas. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui pembagian tugas yang jelas, penyediaan kesempatan pembelajaran, dan penguatan komunikasi internal. Dukungan BPD dan masyarakat dapat membantu mendorong akuntabilitas, sedangkan Pendamping Desa dapat berperan dalam transfer pengetahuan teknis kepada aparatur. Hubungan antara ketiga dimensi kapasitas memperlihatkan bahwa permasalahan penyelenggaraan pemerintahan Desa Merpak bersifat saling berkaitan. Keterbatasan kompetensi individual dapat menghambat pekerjaan administrasi, sedangkan koordinasi organisasional yang belum efektif dapat memperbesar dampak keterbatasan tersebut. Pada saat yang sama, dukungan kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur menentukan sejauh mana keterampilan aparatur dapat diterapkan secara optimal.

Dengan demikian, penguatan kapasitas aparatur Desa Merpak perlu dilakukan secara terpadu melalui peningkatan pengetahuan regulasi, pemerataan keterampilan teknis, perbaikan mekanisme koordinasi kerja, serta penguatan hubungan kelembagaan. Pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan pekerjaan, pendampingan langsung, dan pemanfaatan dukungan lokal merupakan langkah yang relevan untuk meningkatkan kemandirian aparatur dan mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kapasitas aparatur Desa Merpak, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa belum sepenuhnya optimal, baik pada dimensi individual, organisasional, maupun institusional. Pada dimensi individual, keterbatasan pemahaman terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa dan belum meratanya keterampilan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) menyebabkan pelaksanaan administrasi masih bergantung pada perangkat tertentu, khususnya Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan. Pada dimensi organisasional, koordinasi dan komunikasi internal yang belum efektif berdampak pada keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan dan pelaporan. Sementara itu, pada dimensi institusional, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi serta belum optimalnya transparansi dan pengawasan menjadi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan tugas, ketidakmerataan kompetensi aparatur, dan kurangnya sarana pendukung. Meskipun demikian, komitmen Kepala Desa, dukungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), partisipasi masyarakat, serta pendampingan teknis dari Pendamping Desa menjadi faktor pendukung yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas aparatur. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur perlu dilakukan secara terpadu melalui penguatan pemahaman regulasi, pemerataan keterampilan teknis, perbaikan koordinasi kerja, dan pendampingan berkelanjutan agar penyelenggaraan pemerintahan Desa Merpak dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Amiril, N., & Choiriyah, I. U. (2024). Challenges and opportunities in transforming rural governance through e-government in Indonesia. *Indonesian Journal of Public Policy Review, 25*(3). https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i3.1414

Bebbington, A., Dharmawan, L., Fahmi, E., & Guggenheim, S. (2006). Local capacity, village governance, and the political economy of rural development in Indonesia. *World Development, 34*(11), 1958–1976. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.11.025

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Khoiroh, M., & Agustina, I. F. (2024). Bridging the digital divide to improve village governance for global efficiency. *Indonesian Journal of Public Policy Review, 25*(3). https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i3.1391

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Muwardi, A. A., & Sukmana, H. (2024). E-government boosts administrative efficiency in rural Indonesia. *Indonesian Journal of Public Policy Review, 25*(3). https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i3.1376

Novianti, R. D., & Agustina, I. F. (2024). Village information system (SID) effectiveness in improving village administrative services. *Indonesian Journal of Public Policy Review, 25*(1). https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i1.1367

Oktavia, S., & Biduri, S. (2024). Transparent governance: Unveiling accountability in village budget management. *Indonesian Journal of Law and Economics Review, 19*(2). https://doi.org/10.21070/ijler.v19i2.1040

Pratolo, S., Sofyani, H., & Maulidini, R. W. (2022). The roles of accountability and transparency on public trust in the village governments: The intervening role of COVID-19 handling services quality. *Cogent Business & Management, 9*(1), Article 2110648. https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2110648

Putra, V. A., & Putra, W. M. (2025). Accountability, transparency, and fraud propensity in village governments: The mediating role of justice. *Journal of Accounting and Investment, 26*(2). https://doi.org/10.18196/jai.v26i2.25650

Putri, C. M., Argilés-Bosch, J. M., & Ravenda, D. (2024). Creating good village governance: An effort to prevent village corruption in Indonesia. *Journal of Financial Crime, 31*(2), 455–468. https://doi.org/10.1108/JFC-11-2022-0266

Putri, M. H., & Umar, A. R. (2024). Analysis of village financial management. *Indonesian Journal of Public Policy Review, 24*. https://doi.org/10.21070/ijppr.v24i0.1328

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024

Sapitri, A. D., Sari, R. N., & Afifah, U. (2024). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum terhadap kinerja pemerintah desa. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini, 5*(2), 210–221. https://doi.org/10.31258/current.5.2.210-221

Satriyo, M. I., & Agustina, I. F. (2024). Optimizing village assets and stakeholder engagement for income growth. *Indonesian Journal of Public Policy Review, 25*(1). https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i1.1418

Sofyani, H., Yaya, R., & Saleh, Z. (2023). Transparency and community trust in village government: Does corruption perception matter? *Financial Accountability & Management, 39*, 355–374. https://doi.org/10.1111/faam.12351

Sofyani, H., Yaya, R., & Widiastuti, H. (2023). The story of rising corruption post-village government reform—A view of three theories: Fraud, managerial hegemony, and culture. *Journal of Accounting and Investment, 24*(1), 101–119. https://doi.org/10.18196/jai.v24i1.16462

Sussilo, T., & Sukmana, H. (2024). Population administration services and village government performance analysis. *Indonesian Journal of Public Policy Review, 24*. https://doi.org/10.21070/ijppr.v24i0.1332

Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017). Institutional capacity of village government. In *Decentralization and rural development in Indonesia* (pp. 111–123). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-3208-0_9

Utami, F. R., & Mursyidah, L. (2024). Improving the quality of public services from an Indonesian village perspective. *Indonesian Journal of Public Policy Review, 25*(3). https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i3.1389

Wulandari, I. R., & Choiriyah, I. U. (2024). SIPEDE: Enhancing e-government efficiency. *Indonesian Journal of Public Policy Review, 25*(1). https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i1.1348